



## APMS Acong Dilego Rp7,5 M

**PUTUSSIBAU—**Perusahaan milik pemerintah daerah Kapuas Hulu yakni PT. Uncak Kapuas Mandiri (UKM) sudah melakukan komunikasi terkait pembelian (take over) APMS di Kedamin Darat milik Acong. Take over dengan nilai transaksi Rp 7,5 miliar tersebut diupayakan sudah beres sebelum akhir tahun 2015 ini dan saat ini PT.UKM tengah melangkapi semua dokumen-dokumen perusahaan.



Sy. Abubakar Alkadri

Rencana pembelian APMS milik Acong dibenarkan Dirut PT. Uncak Kapuas Mandiri, H. Syarif Abubakar Alkadri. Rencana pembelian yang sudah disertai dengan pembayaran awal (DP) memang sepat terkendala. Terkait pemenuhan administrasi *take over* APMS Kedamin Darat. Salah satunya masalah badan hukum PT UKM, sehingga panjar senilai

◆ Ke Halaman 27 kolom 1

## APMS Acong Dilego Rp7,5 M

*Sambungan dari halaman 17*

Rp 4 miliar dikembalikan lagi pada PT UKM.

"Sekarang NPWP (Nomor Peserta Wajib Pajak) sudah selesai, begitu juga badan hukumnya, selesai pada tanggal 5 November kemaren. Badan hukum memang agak terlambat. Menurut notaris cukup kesulitan. Proses pendirian PT atau BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) bukan swasta biasa butuh proses yang lama," paparnya ketika ditemui wartawan di Setda Kapuas Hulu, Kamis (12/11) kemarin.

Ditegaskan Syarif, untuk take over APMS ini sudah dilakukan perhitungan oleh akuntan publik. Sesuai audit akuntan itu, dana pembelian tidak melebihi Rp 7,5 miliar.

"Ini untuk 1 APMS saja, dana itu sudah termasuk izin,

tanah dan inventaris bangunan. Hingtung-hitungan akuntan sudah lengkap, termasuk harga penyusutan. Para akuntan ini ditunjuk BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)," terangnya.

Untuk langkah transaksi, Syarif belum berani memastikan apakah APMS yang ditake over akan naik status menjadi SPBU. Hal itu akan dirapatkan terlebih dahulu dengan instansi terkait. "Apakah SPBU atau APMS, kami belum bisa memutuskan. Prosedur pendirian atau pun penawaran butuh rapat teknis," ujarnya. Take over APMS kedamin darat milik Acong adalah saran dari Pemkab Kapuas Hulu.

Pembelian APMS yang sudah jadi dinilai lebih tepat dibanding membuat APMS baru. "Kalau bangun baru butuh 2 tahun lagi baru bisa

bangunnya, sementara dana sudah disiapkan tahun ini, kalau tidak digunakan akan dikembalikan ke negara. Kalau pemda membangun sendiri APMS, dana justru lebih besar pada oprasionalnya, penerusan admintrasi ke Pertamina Balik Papan cukup lama," terangnya.

Menurut Syarif, sebelumnya PT. UKM sempat melakukan panjar dana Rp 4 miliar pada pengusaha APMS Kedamin Darat sebagai tanda jadi, tapi karena tidak dibenarkan aturan dana tersebut dikembalikan lagi ke daerah atau PT UKM. Kedepan PT UKM akan menggelar rapat dengan sekretariat daerah. Untuk membahas sistem penyaluran, hingga penentuan karyawan dan hal-hal teknis lainnya.

"Memang ada pola yang harus diperbaiki dari sisi tri

distribusi BBM, salah satunya jadwal oprasional. Selama ini, BBM mudah habis, buka awal sebelum jam 9 biasanya tutup," tutur Syarif. Menurut Dirut PT.UKM ini, kuota dari Pertamina pada APMS yang ditake over tetap sama seperti sebelumnya. Akan tetapi, ada tambahan titik distribusi di kecamatan atau daerah yang jauh dari APMS atau SPBU.

Dijelaskan Syarif, jika PT. UKM sudah mengelola APMS, mungkin akan bekerjasama dengan agen kecamatan. Teknis pengelolaan akan diatur kemudian, tentunya dengan tidak meninggalkan aturan yang berlaku. "Diperkirakan tanggal 20 Desember 2015 ini, APMS Kedamin Darat sudah take over," kata Syarif. Sementara itu, Acong pemilik APMS kedamin darat juga membenarkan adanya transaksi. (*aan*)